



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANUNG ENDAH SUWASTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 412483

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.123.378.000

1. Tanah Seluas 69 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 59.478.000
2. Tanah Seluas 93 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 80.166.000
3. Tanah Seluas 731 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 21.930.000
4. Tanah Seluas 132 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 120.916.000
5. Tanah Seluas 444 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 406.704.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/176 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 263.808.000
7. Tanah Seluas 186 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 170.376.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 244.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA HR-V RU1 1.5 S CVT CKD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.060.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	132.562.132
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.521.000.132
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.521.000.132

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.